

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literature Review*

Dalam penelitian yang diangkat oleh penulis mengenai “Peran *Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)* dalam meningkatkan kualitas pendidikan usia dini di Indonesia”. Sebagai bahan pertimbangan pada penelitian ini dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, lebih tepatnya tiga penelitian. Penelitian - penelitian terdahulu tersebut disebutkan sebagai berikut:

Review 1 : “Upaya *Southeast Asian Ministers of Education (SEAMEO)* Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Poin 4.2 Periode 2017-2018” karya Wina Sumiati. Literatur pertama berfokus dalam memaparkan analisis ilmiah dari program dan layanan ECCE yang berkualitas oleh SEAMEO. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan penulis lebih berfokus ke masyarakat dengan menggunakan Perspektif Konstruktivisme, Teori *Human Development* dan *People Centered Development* yang mana semuanya berkesinambungan dengan tujuan *Sustainable Development Goals*. Penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan SEAMEO telah tepat seperti menjalin kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti *Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood, Politechnic University of Philippine, Aide et Action Internasional* dan *Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire (OMEP)* dalam rangka mempercepat pencapaian target. Penulis juga menganalisis

tiga kegiatan utama SEAMEO yakni *Research dan Development*, *Capacity Building*, dan *Advocacy and Partnership* (Sumiati, 2018) Literatur ini lebih berfokus pada pembahasan pendidikan dan perawatan anak usia dini dan kontribusinya sebagai *Sustainable Development Goals*. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada pembahasan meningkatkan kualitas Pendidikan usia dini di Indonesia.

Review 2 : “Upaya *Southeast Asian Ministers Of Education (SEAMEO)* dalam meningkatkan mutu pendidikan di Asia Tenggara pada era *ASEAN Economic community*” karya Ryan Erick Wardina. Literatur kedua berfokus dalam memaparkan analisis ilmiah dari upaya SEAMEO untuk meningkatkan mutu pendidikan di Asia Tenggara di era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dalam melihat pertumbuhan ekonomi perlu juga pertumbuhan sumber daya manusia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *descriptive kualitatif*. Dalam literatur ini penulis menggunakan konsep *regionalism* dan teori organisasi internasional, menggunakan konsep *regionalisme* sebagai landasan dasar era MEA bentuk dalam upaya kawasan berusaha bersaing dengan negara maju luar kawasan dan menggunakan teori organisasi internasional dalam menjelaskan peran dan fungsi SEAMEO. Penulis menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Asia Tenggara SEAMEO membuat *seven priority agenda* yang menjadi prioritas utama SEAMEO 20 tahun sehingga menganalisis data pendidikan setiap negara anggota dan menjelaskan hambatan dan tantangannya (Wardiqa, 2017) Literatur ini berfokus pada pembahasan pada era MEA, SEAMEO

melakukan upaya yang berupa seven priority agenda dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Asia Tenggara.

Review 3 : “ Kontribusi *Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO) Dalam Pendidikan Inklusif di Indonesia” karya Raina vega. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam literatur ini penulis menggunakan teori Kerjasama internasional dan organisasi internasional. Literatur ini menjelaskan bagaimana keadaan internal suatu negara yaitu penerapan pendidikan inklusif di Indonesia menjadi pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia yang dibawa ke organisasi internasional yaitu SEAMEO. SEAMEO membuat *seven priority agenda* yang berfokus ke area prioritas kedua yaitu *addressing barriers to inclusion* yang mana berarti akan berupaya mengatasi hambatan inklusifitas dan akses pendidikan dasar di Asia Tenggara melalui inovasi penyampaian dan manajemen pendidikan untuk membentuk keadaan yang lebih inklusif serta akses terhadap pendidikan dasar bagi kelompok yang terpinggirkan (vega, 2020). Sedangkan penelitian saya berfokus dalam salah satu point *seven priority agenda* yaitu prioritas pertama ; *achieve universal education for early childhood* dan menganalisisnya secara mendalam khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan usia dini di Indonesia

2.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang penulis gunakan untuk pemahaman dasar permasalahan penelitian ini ada tiga teoritis yaitu; (1) Kerjasama Internasional; (2) Organisasi Internasional; dan (3) Pendidikan. Penggunaan teori kerjasama

internasional diharapkan agar penulis dapat lebih memahami bagaimana kerjasama internasional, khususnya dalam penelitian ini kerjasama regional terbentuk sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional negara pihak. Penggunaan teori organisasi internasional diharapkan agar penulis dapat lebih memahami bagaimana peran sebuah organisasi internasional dalam upayanya membantu negara anggota mencapai kepentingan nasionalnya. Penggunaan teori pendidikan diharapkan agar penulis dapat lebih memahami hakikat pendidikan sehingga lebih memahami permasalahan yang terjadi.

2.2.1 Kerjasama Internasional

Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat dinyatakan sebagai hubungan antara negara satu dengan negara lain dan upaya untuk memenuhi kepentingan nasional dan kepentingan bersama negara - negara di dunia. Ada berbagai cakupan dalam kerjasama internasional yaitu kerjasama di bidang politik, pertahanan dan keamanan, budaya dan ekonomi, tergantung pada politik luar negeri masing - masing negara. Menurut teori ini neo liberal meremehkan anarki terutama dalam hal “kecurangan” di dalam kerjasama yang merupakan rintangan terbesar di antara aktor - aktor yang rasional dan egois, kerjasama menjadi tidak efektif ketika ada pihak yang melakukan kecurangan karena mereka beranggapan bahwa tidak ada otoritas pusat di dalam dunia internasional (Ikbar, 2014)

Dilandasi oleh pemahaman bahwa negara maupun organisasi saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang

sama maka terjadi peningkatan kerjasama antara negara dan negara yang melibatkan institusi atau organisasi internasional untuk memanfaatkan forum institusi atau organisasi demi mendapatkan informasi dalam kerjasama menjadi lebih mudah (Keohane , 2001)

Dalam bukunya Keohane dan Robert Axelrod berusaha menjelaskan bahwa ada tiga alasan terjadinya keberhasilan kerjasama yaitu jumlah aktor yang terlibat ,masalah kepentingan yang sama, serta *Shadow of the future* (Axelrod Robert, 1985). Ada empat factor yang mempengaruhi yaitu adanya informasi tentang tindakan aktor, jangka waktu harapan masa depan, keteraturan situasi dan kondisi dan umpan balik dalam suatu kerjasama. Meletakkan konsep masyarakat politik internasional proses integrasi untuk menciptakan kesatuan melalui multilateralisme dalam organisasi internasional, rezim internasional dan aktor internasional (James E Dougherty, 1997)

Kerjasama internasional dapat didorong oleh empat factor yaitu (1) Kemajuan di bidang teknologi sehingga berkembang nya bentuk hubungan karena arus informasi yang semakin mudah didapat dan meningkatkan ketergantungan suatu negara terhadap negara lainnya; (2) Kemajuan dan pembangunan di bidang ekonomi; (3) Kemauan bersama untuk saling melindungi dalam bentuk kerjasama internasional; (4) Kesadaran dan kemauan untuk berunding dalam memudahkan upaya pemecahan masalah bersama.

Ada beberapa bentuk kerjasama internasional yaitu bilateral, regional dan multilateral. Pada penelitian ini saya akan berfokus dalam kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional ialah kerjasama internasional yang negara anggotanya dibatasi atas kedekatan wilayah dan geografis. Negara luar kawasan juga boleh bergabung namun sebagai negara asosiasi. Ada yang beranggapan bahwa kerjasama regional terbentuk karena sebagai bentuk pertahanan diri dari arus globalisasi yang berupaya mendominasi maka dari itu terbentuk kerjasama regional untuk menetapkan identitas bersama.

Ada beberapa faktor pendukung terjadinya kerjasama regional yaitu (1) Yang pasti adalah kedekatan wilayah sehingga secara teknis tidak perlu biaya yang banyak saat menghadiri forum internasional; (2) Kebudayaan dan kebiasaan yang tergolong mirip antara negara anggota; (3) Terdapat kemiripan secara historis sehingga ada keinginan untuk membangun wilayah secara bersama - sama; dan (4) Terbentuknya penetapan bersama di kawasan sehingga meminimalisir terjadinya konflik dalam kawasan.

2.2.2 Organisasi Internasional

Rudi berpendapat bahwa definisi organisasi internasional didasarkan pada kerja sama yang melintasi batas - batas negara yang didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung berkepanjangan serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga, guna mengusahakan tercapainya tujuan

- tujuan dan menemukan kesepakatan bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah dan negara yang berbeda (Rudy, 2005)

2.2.2.1 *Bentuk Organisasi Internasional*

Organisasi internasional pun terdiri dari dua bentuk yaitu *International Governmental Organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGOs) lalu yang membedakan diantara keduanya menurut Birkin ialah IGO dibentuk atas dasar kesepakatan bersama antara pemerintah suatu negara sedangkan NGO dibentuk atas dasar kesepakatan bersama antar korporasi/individual/perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama. NGO dapat melakukan suatu kegiatan yang melewati batas wilayah negara, namun tidak dibentuk oleh pemerintah. NGO dan *Transnational Corporation* (TNCs) merupakan bagian internal dari sistem politik internasional (Barkin 2006)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa IGO adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara negara, sedangkan NGO berdasarkan kesepakatan antar individu. IGO dibagi atas empat kategori berdasarkan keanggotaannya dan tujuannya (Wolfe Coloumbis, 1990):

1. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas. Organisasi ini memiliki fungsi dan fungsi tertentu.

Dan dapat juga disebut sebagai badan fungsional dalam sistem politik internasional.

2. Organisasi dengan keanggotaan dan tujuan umum. Fungsi umum organisasi meliputi hal - hal seperti keamanan, kerjasama sosial ekonomi, perlindungan hak - hak asasi manusia dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan
3. Organisasi dengan keanggotaan dan tujuan terbatas. Organisasi yang membagi organisasi sosial, ekonomi dan militer sebagai unit fungsional di dalam anggotanya.
4. Organisasi dengan keanggotaan terbatas dan tujuan umum. Organisasi tersebut merupakan organisasi regional yang anggotanya ditentukan oleh kondisi geografis, fungsi dan tanggung jawab nya bersifat umum.

2.2.2.2 *Peran Organisasi Internasional*

Organisasi internasional sendiri mempunyai tiga peran penting, 3 peran penting tersebut menurut Clive Archer adalah sebagai berikut :

1. Aktor, organisasi internasional juga dapat menjadi aktor yang *autonomous* bertindak sebagai organisasi internasional dan tidak lagi terbatas untuk mewujudkan kepentingan anggotanya.

2. Instrumen, yaitu untuk mencapai kesepakatan, untuk mengurangi intensitas konflik dan mengkoordinasikan tindakan.
3. Arena, untuk berhimpun, berkonsultasi dan memulai pengambilan keputusan bersama atau perjanjian internasional.

2.2.2.3 *Fungsi Organisasi Internasional*

Menurut Clive Archer ada Sembilan fungsi dari organisasi internasional yakni sebagai berikut; (1) artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara - negara anggota; (2) hasilkan norma - norma; (3) rekrutmen; (4) sosialisasi nilai; (5) pembuatan keputusan; (6) penerapan keputusan; (7) penilaian/penyelarasan keputusan; (8) tempat memperoleh informasi dan (9) operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan.

2.2.2.4 **Klasifikasi organisasi internasional**

Selain itu organisasi internasional dapat di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan atau cara peninjauan organisasi tersebut (suwandi, 2004) sebagai berikut :

1. Klasifikasi organisasi internasional permanen dan tidak permanen.

Perbedaan antara organisasi internasional permanen dan organisasi internasional non-permanen tampak jelas dari tahap operasional

organisasi internasional. Organisasi internasional permanen ialah organisasi yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, seperti PBB. Disisi lain, organisasi internasional non-permanen ialah organisasi internasional dengan periode yang di tentukan, seperti untuk 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun dan sebagainya, atau tujuan organisasi tersebut sudah tercapai maka organisasi itu bubar.

2. Klasifikasi organisasi internasional publik dan swasta.

Organisasi internasional publik yang beranggotakan negara didasari atas kesepakatan antara negara - negara anggota. Organisasi ini berhubungan dengan pemerintah dan pemerintah posisinya sebagai aktor yang mempunyai hak dan kewajiban.

Disisi lain, organisasi internasional swasta dapat melibatkan lembaga swasta dan organisasi dari berbagai negara. Organisasi internasional swasta tersebut dilindungi oleh hukum nasional negara anggota sedangkan organisasi internasional publik dilindungi oleh hukum internasional.

3. Klasifikasi organisasi universal dan terbatas.

Klasifikasi ini didasarkan pada sistem keanggotaannya, yang membedakan antara organisasi internasional universal dan terbatas. Organisasi internasional yang universal adalah organisasi nasional yang datanya dari semua negara. Peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional juga bersifat universal, suatu peraturan dari hukum dunia (*world law*)

Kalinya organisasi bersifat terbatas anggotanya didasari pada kriteria - kriteria tertentu, Schemers menyebutnya *closed organizations*. Organisasi internasional terbatas ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu; (1) organisasi regional; (2) organisasi dengan latar belakang yang sama; (3) organisasi fungsional.

4. Klasifikasi yang didasari pada sifat organisasi yaitu supra nasional.

Organisasi supra nasional adalah organisasi kerjasama di bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif, termasuk pada level warga negara. Organisasi internasional yang bersifat supra nasional memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat secara langsung dan mengeluarkan

peraturan kepada negara - negara anggota atau perusahaan di negara negara anggota. Persyaratan organisasi yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi supra nasional yaitu:

- a. Keputusan tersebut mengikat negara anggota;
 - b. Alat pendukung keputusan tidak hanya mengandalkan kerja sama semua anggota.
 - c. Organisasi memiliki kekuasaan untuk membuat aturan yang secara langsung mengikat orang - orang dari negara anggota. Kewenangan yang demikian mungkin dapat mendesak fungsi pemerintahan tanpa kerjasama dengan pemerintah nasional negara anggota;
 - d. Organisasi harus memilki kewenangan untuk melaksanakan keputusan ini;
 - e. Keuangan organisasi bersifat otonom dan berasal dari dana yang disediakan oleh negara anggota;
 - f. Penarikan diri secara universal tidak mungkin.
5. Klasifikasi berbasis fungsi.

Organisasi fungsional yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi sering disebut sebagai organisasi teknis. Klasifikasi berdasarkan fungsi khusus dapat dibagi menjadi empat fungsi; (1) fungsi pengadilan (*judicial institution*); (2) fungsi administratif (*administration institution*); (3) fungsi legislative semu (*Quasi international legislation*); dan (4) fungsi serba guna (*comprehensive*).

2.2.3 Pendidikan

Pendidikan sangat luas dan dapat berupa ilmu yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Pendidikan dapat ditempuh secara formal melalui lembaga mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan secara informal dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Rini, 2013)

Salah satu sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 mengatur pendidikan bertujuan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya dan memungkinkan mereka memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

potensinya melalui proses pembelajaran pada suatu bentuk, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Terdapat enam fungsi pendidikan (Departemen pendidikan Nasional) yaitu :

1. Mengenalkan peraturan dan penanaman disiplin kepada anak
2. Mengenalkan anak pada dunia sekitarnya
3. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik
4. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar
5. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi
6. Mengembangkan keterampilan, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak

Maka hakikat pendidikan dapat diuraikan dengan tabel dan uraian berikut (Rini, 2013) :



1. Manusia mencari proses yang berkesinambungan. Manusia merekonstruksi pengalaman dan proses pertumbuhan yang

mengarah pada pertumbuhan lebih lanjut. Hal ini disebut *process of continues reconstruction of express*.

2. Korelasi ini sejak masa kanak - kanak, remaja hingga dewasa atau dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja, sehingga korelasi tersebut berkaitan dengan kelangsungan pendidikan.
3. Keinginan manusia harus selaras dengan tanggung jawab manusia dan pendidikannya, termasuk pendidikan formal dan masyarakat.
4. Masa penyesuaian adalah masa fleksibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan diri pada saat itu. Artinya manusia harus mampu dan mau menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, desa, kota. Tingkat pendidikan atau pendidikan rendah, miskin atau kaya. Selain itu harus beradaptasi dengan tempat atau lingkungan geografis.
5. Manusia berusaha secara sadar untuk mempersiapkan siswa melalui bimbingan pembelajaran agar dapat menguasai keterampilan sesuai dengan peran yang harus dimainkan manusia.

2.2.3.1 Pendidikan anak usia dini

Pasal 1 tahun 2003 undang - undang nomor 20 sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pelatihan bagi tumbuh kembang jasmani dan rohani anak

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, untuk mempersiapkan anak untuk memasuki sekolah. Perawatan anak usia dini juga berperan penting dalam mencapai hasil pendidikan anak usia dini yang optimal. Menurut pendidikan kebudayaan nomor 37 tahun 2014, pendidikan anak usia dini ditujukan untuk merangsang dan memaksimalkan perkembangan anak. (Kemendikbud 2014)

Dr. Benyamin S. Bloom mengemukakan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0-4 tahun mencapai 50% (Cropley, 1999). Ini berarti bahwa pendidikan anak harus berusia 0 sampai 4 tahun. Tanpa tingkat pembelajaran ini, otak anak tidak akan terstimulasi secara maksimal. Jika tingkat ini tidak dapat tercapai, perkembangan otak anak tersebut tidak berkembang secara normal dan optimal.

Studi fakultas kedokteran Universitas Baylor menunjukkan bahwa lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan optimal dari sikap, kepribadian dan kemampuan anak. Artinya jika anak tidak memiliki lingkungan yang baik untuk merangsang perkembangan otaknya, maka perkembangan otaknya akan 20 - 30% lebih kecil dari ukuran normal anak.

Pertumbuhan dan perkembangan setiap anak tergantung faktor keturunan (genetik), lingkungan dan cara perawatan kesehatan dan konvergensi (kombinasi antara bakat dan

lingkungan), ada yang cepat dan ada yang lambat,. Oleh karena itu, penanganan pada anak tidak bisa bersifat umum, perhatian khusus harus diberikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. (Direktorat Tenaga Teknis, 2003)

Ide tentang pendidikan anak usia dini telah bercampur dengan paradigma kapitalis manusia melihat bahwa jasa pendidikan anak usia dini sebagai investasi masa depan lalu kebijakan dan prioritas di tingkat nasional pun merangkul ide tersebut (Octarra H. , 2018). Peran keluarga tidak dapat tergantikan sekalipun anak telah di didik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal (Direktorat pendidikan nasional, 2012)

Perkembangan anak usia dini yang merupakan kunci kehidupan produktif disebut sebagai fase kritis yang dapat menjadi landasan bagi kebahagiaan dan pembelajaran di masa depan. Studi menunjukkan bahwa setengah dari kemampuan intelektual seseorang berkembang pesat pada usia empat tahun. Intervensi di masa anak usia dini ini meninggalkan bekas yang bertahan lama pada kapasitas intelektual, kepribadian dan perilaku social.

Program pengembangan pendidikan anak usia dini juga dilihat sebagai upaya untuk mempromosikan perkembangan anak secara menyeluruh seperti meningkatkan sinergi antara kesehatan yang baik gizi yang baik dan stimulasi kognitif untuk perkembangan yang sehat pada usia dini.

Adapun tujuan PAUD dapat dijelaskan menjadi empat tujuan utama (Risaldy, S. & Idris, M.H , 2014) :

1. Sebagai kerangka dasar bagi anak untuk beradaptasi dengan lingkungan serta pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.
2. Intervensi dini, pemberian stimulasi edukasi, agar potensi - potensi terpendam anak dapat tumbuh.
3. Mengembangkan potensi - potensi yang sudah terlihat pada anak.
4. Mampu mendeteksi dini kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan serta perkembangan potensi - potensi yang dimiliki anak usia dini.

Lalu selain tujuan PAUD juga mempunyai tiga fungsi utama (Risaldy, S. & Idris, M.H , 2014) yaitu :

1. Fungsi adaptasi atau social

PAUD memainkan peran yang berguna dalam situasi dan kondisi anak - anak. Setelah itu, anak - anak menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi di sekitarnya sebagai pengenalan berbagai pola sikap, perilaku, kebiasaan dan sifat orang disekitar yang dapat membantu memahami aspek psikologi dan lingkungan sosial anak.

2. Fungsi pengembangan

PAUD berperan dalam menumbuh kembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak dengan memberi suatu situasi atau lingkungan edukatif sehingga potensi tersebut dapat berkembang optimal dan bermanfaat bagi anak itu sendiri dan lingkungannya.

3. Fungsi bermain

PAUD berperan sebagai tempat bermain anak - anak, bermain merupakan hak anak sepanjang rentang hidupnya melalui bermain anak - anak bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan melalui kegiatan bermain neuron - neuron otak pada anak berkembang dengan pesat.

Contoh pendidikan usia dini di Asia Tenggara seperti, Thailand, Malaysia, dan Singapore :

1. Thailand

Di Thailand, isu mengenai perkembangan anak usia dini telah menjadi agenda perencanaan nasional dalam rencana pembangunan sosial ekonomi nasional kesepuluh (2007-2011). Dalam rencana tersebut, Thailand secara khusus menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan proporsi balita yang menjamin perkembangan normal dari 67,7% pada tahun 2007 menjadi lebih dari 80% pada tahun 2011. Tingkat pemberian ASI pada bayi enam bulan dari yang awalnya 14,7% menjadi lebih dari 30%.

Upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak usia dini.

Thailand telah berhasil mencapai beberapa hal, yaitu:

- a. Buku pegangan tentang kesehatan ibu dan anak yang berisi prinsip - prinsip dan praktek - praktek yang tidak boleh dan boleh dilakukan dalam pengasuhan anak telah berhasil dikembangkan.

Telah berhasil menghasilkan buku pedoman kesehatan ibu dan anak, yang mungkin sesuai atau tidak sesuai untuk anak - anak. Dan tindakan perlindungan.

- b. Program pengasuhan juga menerapkan pola asuh dari tiga semester pertama dan kemudian dilanjutkan hingga anak berusia tiga tahun sebelum dan sesudah melahirkan.
- c. Program "*family love bonding hospital program*" yang mendorong rumah sakit untuk menyediakan fasilitas yang ramah anak, aman bagi ibu dan dapat melibatkan masyarakat pun telah berhasil diwujudkan.

Selain pencapaian tersebut ada beberapa hal yang membuat rencana aksi sulit dicapai, misalnya :

- a. Kurangnya pemahaman tentang pengasuhan dalam mempromosikan perkembangan anak.
- b. Ketidaksetaraan akses yang dimiliki masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini.

- c. Tidak terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk yang kurang beruntung.
- d. Layanan kesehatan hanya menyediakan vaksinasi saja.
- e. Sektor pemerintahan kekurangan tenaga medis.
- f. Kurangnya kunjungan rumah untuk pengasuhan anak pasca persalinan.

Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri mengumumkan undang - undang dalam bentuk kebijakan dan strategi jangka panjang pada bulan Mei 2007. Menurut kebijakan ini kegiatan pendidikan anak usia dini dibagi menjadi dua kelompok. Usia 0-3 tahun dan 3-5 tahun. Kebijakan dan strategi jangka panjang untuk pendidikan anak usia dini grup usia 0-5 tahun (2007-2016) memberikan panduan yang berguna dan sangat dibutuhkan untuk layanan pendidikan anak usia dini dengan fokus pada perlindungan, keamanan dan semua hal yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Malaysia

Di negara tersebut undang undang pengasuhan anak 1984, revisi pada 2007, menjamin kualitas pendidikan anak usia dini.. UU 550 yang merupakan undang - undang pendidikan nasional secara resmi memasukkan pendidikan prasekolah kedalam sistem pendidikan. Kurikulum pendidikan anak usia dini secara resmi dimulai pada tahun 2003. Pendidikan awal di Malaysia dibagi

menjadi dua kelompok 0 – 4 tahun dan 4 - 6 tahun. kelompok usia 4 - 6 tahun di bawah Kementerian pendidikan, Kementerian pembangunan daerah dan pedesaan (MRRD) dan Departemen kesatuan dan integrasi nasional. Sementara kelompok usia 0-4 tahun di bawah Kementerian pembangunan masyarakat, keluarga dan perempuan, dan MRRD. MRRD di akui sebagai penggagas pendidikan prasekolah di Malaysia.

Di Malaysia kebijakan mengenai pelayanan kesehatan anak dipromosikan melalui program - program yang meliputi kunjungan rutin dan pemeriksaan kesehatan anak, imunisasi, pemantauan dan penilaian status gizi dan pertumbuhan dan pengetahuan kesehatan anak.

3. Singapura

Di negara ini, Undang - Undang pusat pengasuhan anak dan peraturan pusat pengasuhan anak tahun 1988 mulai berlaku untuk mengontrol, mengizinkan dan mengatur pusat pengasuhan anak usia 18 bulan sampai tujuh tahun. Pusat pengasuhan anak ini telah disahkan oleh Kementrian masyarakat, pemuda dan olahraga. Taman kanak - kanak telah terdaftar oleh Kementrian pendidikan. Sejak januari 2022, Singapura juga mulai mensertifikasi pendidikan prasekolah.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah penulis paparkan, maka penulis mencoba menarik hipotesis sebagai berikut : **“Dengan adanya Peran SEAMEO berupa Program Pelatihan Konsultasi, Penelitian dan Inovasi, maka hal tersebut dapat terimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Usia Dini di Indonesia ditandai oleh pengembangan materi pengajaran dan pembelajaran pengembangan kapasitas pihak sekolah dan guru dan pengembangan fasilitas Pendidikan Usia Dini”**.

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Table 2.1 Table Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam hipotesis (Teoritis)	Indikator (Empiris)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas : Implementasi program SEAMEO dalam Pendidikan usia dini di Indonesia	1. Adanya Program pelatihan konsultasi penelitian dan inovasi dari SEAMEO untuk Indonesia	1. Adanya data terkait program pelatihan, konsultasi, penelitian, dan inovasi dari SEAMEO untuk Indonesia a. <i>Action Agenda for the SEAMEO 7 Priority Areas 2018</i> b. <i>SEAMEO 7 Priority Areas Implementation by SEAMEO Member Countries 2017</i> c. <i>Executive Summary Report: A Year of Accomplishments 2019</i>

		<p>d. SEAMEO CECCEP <i>Annual Report 2018/2019</i></p> <p>e. SEAMEO SEN <i>Annual Report 2016/2017</i></p> <p>f. SEAMEO SEN <i>Annual Report 2018/2019</i></p> <p>g. SEAMOLEC <i>Annual Report 2018/2019</i></p> <p><i>SEAMOLEC Annual Report 2017/2018</i></p>
<p>Variabel terikat : Meningkatkan kualitas Pendidikan usia dini di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak pihak sekolah dan guru kesulitan dalam mengajar dan mendidik murid di sekolah pendidikan usia dini 2. Masih sedikitnya pusat pengajaran dan pembelajaran pendidikan usia dini di Indonesia 3. Masih sedikitnya fasilitas pengajaran dan pendukung pembelajaran yang dibutuhkan murid usia dini dalam aktivitas luar kelas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data terkait hambatan penerapan pendidikan usia dini di Indonesia dari pihak sekolah 2. Problematika penyelenggaraan pendidikan usia dini di Indonesia 3. Adanya data terkait sedikitnya kehadiran murid usia dini di PAUD 4. Menciptakan Kesetaraan yang responsif melalui pendidikan usia dini (inovasi untuk anak sekolah Indonesia,2020) 5. Membangun masa depan anak usia dini 6. Problematika penyelenggaraan pendidikan usia dini di Indonesia 7. Permasalahan - permasalahan yang

		<p>dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan usia dini</p> <p>8. Adanya data terkait sedikitnya pusat pengajaran dan pembelajaran pendidikan usia dini di Indonesia</p>
--	--	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis penulis menggambarkan sebuah skema untuk peneliti maupun pembaca agar lebih mudah memahami konteks dan isi penelitian ini.

